

MENUJU KEJAYAAN LAMONGAN: PENGUATAN BIROKRASI MELALUI PROGRAM PRIORITAS DI KABUPATEN LAMONGAN

Muhammad Chusnul Khitam¹, Fahmi Anas² dan Noer Chamid³

¹Universitas Islam Lamongan

Jl. Veteran No.53A, Jetis, Lamongan

Email: muhchusnul@unisla.ac.id

²Universitas Islam Lamongan

Jl. Veteran No.53A, Jetis, Lamongan

Email: anasf412@gmail.com

³Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Lamongan, Jl. Basuki Rahmad No.1 Lamongan

Email: n1chamid@gmail.com

ABSTRAK

Tantangan strategi Pemerintah daerah kedepan adalah mampu meningkatkan kualitas kebijakan yang disusun melalui peningkatan kapasitas kebijakan setidaknya pada level organisasi, maka setiap perangkat daerah atau birokrasi pemerintahan harus mampu menyusun rumusan kebijakan, melaksanakan hingga memperoleh dukungan dari berbagai stakeholder atas kebijakan yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik penelitian dilakukan dengan wawancara, Forum Grup Discussion studi dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian ini adalah mengantisipasi perubahan global yang cepat, strategi pemerintah membangun tata kelola pemerintahan harus lebih dinamis (dynamic governance). Strategi penguatan Birokrasi diharapkan mampu melahirkan para pemimpin birokrasi yang mampu berpikir kedepan (thinking ahead), mengkaji ulang (thinking again) dan belajar dari Negara atau organisasi lain (thinking across).

Kata kunci: Birokrasi, Dinamic governance, Pemerintah daerah

ABSTRACT

The challenges of future local government strategies in the ability to improve the quality of policies formulated through the enhancement of policy capacity, at least at the organizational level. Therefore, every regional apparatus or government bureaucracy must be able to formulate policy designs, implement them, and gain support from various stakeholders for the policies undertaken. This study employs a qualitative descriptive approach. The research techniques used include interviews, focus group discussions, document studies, and observations. The findings of this research show that to anticipate rapid global changes, government strategies in building governance must be more dynamic (dynamic governance). Strengthening the bureaucracy is expected to produce bureaucratic leaders who are capable of thinking ahead, thinking again, and thinking across by learning from other countries or organizations.

Keywords: Bureaucracy, Dynamic Governance, Local Government.

PENDAHULUAN

Penetapan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, telah membawa perubahan sistem pemerintahan yang sangat signifikan terutama hubungan antara pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Tebay, 2020). Salah satu faktor dan aktor utama yang turut berperan dalam perwujudan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan kepemimpinan yang baik (*good governance*) adalah birokrasi, dalam posisi dan perannya yang demikian penting dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik, birokrasi sangat menentukan efisiensi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota, baik dalam bentuk himbauan, kebijakan dan bahkan seperangkat aturan hukum telah disiapkan pemerintah (daerah), apalagi adanya tuntutan yang cukup deras dari masyarakat sebagai penerima layanan untuk dilakukannya reformasi birokrasi dilingkungan pemerintahan (daerah).

Kecenderungan birokrasi dan birokratisasi pada masyarakat modern benar-benar dipandang memprihatinkan, sehingga digambarkan adanya ramalan mengenai makin menggejalanya dan berkembangnya praktek-praktek birokrasi yang paling rasionalpun tidak bisa lagi dianggap sebagai kabar menggembirakan, melainkan justru merupakan pertanda malapetaka dan bencana baru yang menakutkan yakni munculnya patologi birokrasi. Hal itu dicirikan oleh kecenderungan patologi karena persepsi, perilaku dan gaya manajerial, masalah pengetahuan dan ketrampilan, tindakan melanggar hukum, keperilakuan, dan adanya situasi internal. Birokrasi memiliki kecenderungan mengutamakan kepentingan sendiri (*self serving*), mempertahankan statusquo dan resisten terhadap perubahan, dan memusatkan kekuasaan. Hal inilah yang kemudian memunculkan kesan bahwa birokrasi cenderung lebih mementingkan prosedur daripada substansi, lamban dan menghambat kemajuan.

Reformasi birokrasi pemerintahan dimaknai sebagai perubahan besar dalam

paradigma tata kelola pemerintahan yang mengarah pada organisasi (kelembagaan) tatalaksana, Sumber Daya Manusia (SDM), pelayanan, dan akuntabilitas. Reformasi menurut Samin adalah gerakan untuk mengubah bentuk dan perilaku suatu tatanan, karena tatanan tersebut tidak lagi disukai atau tidak sesuai dengan kebutuhan zaman baik karena tidak efisien, tidak bersih atau tidak demokratis (Ramzi, 2011). Birokrasi pemerintahan merupakan unsur yang sangat vital dalam menentukan arah untuk mencapai suatu keberhasilan dalam penyelenggaraan negara. Adapun Pendapat Thoha Birokrasi adalah pemerintahan atau pengelolaan masyarakat secara tertulis, terencana, terdokumentasi secara rapi dan dilakukan oleh orang terdidik dan beradab (Miftah, 2000).

Berbagai gerakan reformasi birokrasi yang dialami Negara-negara maju banyak diilhami oleh tekanan masyarakat akan perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik yang diberikan pemerintah. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang demikian pesat serta persaingan global yang semakin ketat masyarakat semakin peka terhadap kinerja birokrasi pemerintahan dan sangat peduli terhadap peningkatan kualitas hidupnya. Baik buruknya kinerja birokrasi pemerintah akan sangat menentukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahnya. Asropi persoalan utama reformasi birokrasi adalah masalah SDM baik menyangkut komitmen pimpinan, kualitas dan moralitas SDM, sistem sebagai faktor penentu kinerja reformasi birokrasi Pemerintahan Daerah belum memuaskan (Asropi, 2008).

Hingga saat ini seringkali disinyalir bahwa manajemen sektor pemerintahan pada umumnya masih tertinggal dibandingkan sektor swasta. Kinerja aparatur daerah yang masih rendah dan tertinggal tersebut dapat terjadi dikarenakan kekeliruan dalam desain strategi proses rekrutmen, reposisi, pembekalan, dan perawatannya. Belum optimalnya kinerja aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsinya, ditunjukkan dengan masih banyaknya keluhan-keluhan yang disampaikan masyarakat atas pelayanan publik yang diberikan pemerintah selama ini, juga masih seringnya ditemukan kasus penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), juga penempatan aparatur yang tidak sesuai dengan persyaratan jabatan.

Reformasi birokrasi pemerintah menjadi bagian dan upaya untuk memperkuat negara karena melalui reformasi birokrasi peran pemerintahan didefinisikan ulang untuk menjawab tantangan, karena reformasi birokrasi tidak sekedar menyederhanakan struktur birokrasi akan tetapi dapat mengubah pola pikir dan pola budaya birokrasi untuk berbagai peran dalam tata kelola pemerintahan. Selanjutnya Asropi mengatakan Budaya sangat berpengaruh besar terhadap kinerja reformasi birokrasi dan budaya birokrasi sangat penting bagi reformasi birokrasi pemerintahan di daerah (Asropi, 2008).

Reformasi birokrasi pemerintahan sangat mendesak untuk dilakukan ketika dikaitkan dengan berbagai perubahan dalam konteks era globalisasi antara lain perubahan paradigma kekuasaan yang semula sentralisasi di era reformasi ini membawa perubahan yang berarti dalam sistem dan relasi kekuasaan menjadi demokratis dan terdistribusi melalui asas desentralisasi. Reformasi birokrasi pemerintahan telah dicanangkan sejak era reformasi bergulir akan tetapi mengalami hambatan dan kelambatan dalam realitanya seperti perubahan perilaku birokrasi belum tampak berubah ke arah yang lebih baik, semakin banyaknya pejabat atau birokrat yang tersangkut korupsi, pelayanan kepada masyarakat baik di pusat maupun di daerah masih belum menunjukkan kinerja yang optimal meskipun asas desentralisasi telah direalisasikan, program-program pencapaian reformasi birokrasi telah disediakan akan tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak Pemerintah Daerah sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat belum terwujud dengan baik.

Begitu juga berbicara masalah kinerja masih dapat dikatakan belum baik walau indikator kinerja telah tersedia, untuk itu reformasi birokrasi Pemerintahan Daerah yang memuat model konseptual reformasi birokrasi sebagai landasan dalam melakukan pembenahan struktur dan kultur birokrasi Pemerintahan Daerah serta strategi reformasi birokrasi yang berisi langkah-langkah pembenahan birokrasi sangat penting di era reformasi dalam menghadapi era globalisasi inilah reformasi birokrasi pemerintahan termasuk Pemerintahan Daerah sangat diperlukan sebagai landasan dalam melakukan

pembenahan struktur dan kultur birokrasi Indonesia termasuk kultur birokrasi daerah serta langkah-langkah pembenahan birokrasi di era globalisasi menjadi sangat penting dan strategis. Reformasi birokrasi ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan untuk menetapkan arah dan dasar kebijakan dalam menyusun program-program di Pemerintahan Daerah, khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan.

Prioritas pembangunan Kabupaten Lamongan pada tahun 2026 merupakan penjabaran Visi Misi dan Tujuan Pemerintah Kabupaten Lamongan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029. Penetapan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, telah membawa perubahan sistem pemerintahan yang sangat signifikan terutama hubungan antara pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Tebay, 2020). Kebijakan yang mendukung prioritas daerah yang berdasarkan Tema RKPD Kabupaten Lamongan Tahun 2026 yaitu “Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Pemupukan Modal Sosial Sebagai Landasan Menuju Kejayaan Berkelanjutan”. Penetapan program dan kegiatan prioritas didasarkan melalui harmonisasi dan keselarasan RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Timur dan RPJMD Kabupaten Lamongan tahun 2025-2029 diharapkan dapat memacu tercapainya target kinerja utama di tahun 2026 dan mendukung pencapaian target prioritas nasional, provinsi maupun Kabupaten Lamongan.

Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkelanjutan adalah visi Kabupaten Lamongan lima tahun kedepan pasca terpilihnya Bupati Lamongan periode 2025-2029. Kejayaan yang dimaksud adalah suatu kondisi terwujudnya Lamongan sebagai kabupaten yang terdepan (masyhur) unggul, maju dalam pembangunan sumber daya manusia, infrastruktur, kebudayaan dan ekonomi berbasis potensi unggulan sehingga terwujud kesejahteraan lahir batin bagi masyarakat. Visi kepala daerah menjadi arah pembangunan pemerintahan daerah Kabupaten Lamongan kedepan. Kebijakan-kebijakan dalam rangka mengembangkan potensi daerah untuk pertumbuhan ekonomi, pelayanan wajib dasar, serta pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur harus diarahkan dalam rangka mencapai visi tersebut.

Penelitian ini memfokuskan pada strategi birokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamongan. Dalam menjalankan strategi tantangan kedepan adalah mampu meningkatkan kualitas kebijakan yang disusun melalui peningkatan kapasitas kebijakan setidaknya pada level organisasi. Visi Kabupaten Lamongan agar mampu diturunkan menjadi program dan kegiatan yang berkualitas, maka setiap perangkat daerah atau birokrasi pemerintahan harus mampu menyusun rumusan kebijakan, melaksanakan hingga memperoleh dukungan dari berbagai stakeholder atas kebijakan yang dilakukan. Merujuk pada pendapatnya Wu, et.al (2018) bahwa kapasitas kebijakan merupakan serangkaian ketrampilan atau kompetensi dan sumber daya yang diperlukan untuk melakukan fungsi-fungsi dalam kebijakan

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna berasal dari masalah sosial (Cresswell, 2017). Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dengan menganalisis reformasi birokrasi pada Pemerintahan Kabupaten Lamongan, apa yang dapat diadopsi oleh negara lain dalam menerapkan reformasi birokrasi. Metode Pengumpulan data yang dilakukan ialah dengan desk study terhadap data sekunder dari sumber-sumber data yang telah ada (existing resources) lalu dari eksplorasi bahan-bahan pustaka dikaji secara holistik kemudian dianalisis berdasarkan kerangka berpikir yang melandasinya (Hamzah, 2019). Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung diperoleh peneliti (Satori & Komariah, 2011). survei).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu faktor dan aktor utama yang turut berperan dalam perwujudan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah birokrasi. Dalam posisi dan perannya yang demikian penting dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik, birokrasi sangat menentukan efisiensi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta efisiensi

dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Visi dan Misi Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamongan.

Bupati Yuhronur Efendi (YES) menyampaikan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029 akan berfokus terhadap visi besar yakni Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkelanjutan. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Inklusif Melalui Optimalisasi Potensi Sektor Unggulan; Mewujudkan Daya Saing Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berahklak dan Adaptif Terhadap Perubahan Zaman; Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Mantap dan Berwawasan Lingkungan; Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Dalam Harmoni Sosial Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Berbudaya Dan Partisipatif Dalam Pembangunan.; dan Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Berdampak Melalui Digitalisasi Manajemen Pemerintahan yang Akuntabel dan Responsif.

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah tidak cukup dengan ketersediaan sumber daya aparatur saja, namun juga diperlukan sumber daya aparatur yang kompeten dan kesesuaian penempatan perangkat daerah dengan kompetensi yang dimiliki. Sehingga upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang diampu oleh perangkat daerah adalah melakukan pengembangan kompetensi bagi Konteks Sumber Daya Aparatur.

Samakan persepsi dan tingkatkan pemahaman pejabat, Pemerintah Kabupaten Lamongan lakukan pembinaan dan sosialisasi melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia (BKPSDM), Pemerintah Kabupaten Lamongan ingin menyamakan persepsi dan meningkatkan pemahaman pejabat birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan tentang manajemen ASN dengan pembinaan dan sosialisasi penerapan manajemen kinerja, tata cara pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dan penegakan disiplin PNS kepada Pejabat Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

Pengembangan sumber daya aparatur berhubungan erat dengan upaya reformasi birokrasi dengan tujuan untuk peningkatan kemampuan

intelektual yang diperlukan dalam rangka untuk melaksanakan pekerjaan yang lebih baik. Selain itu adanya pengembangan sumber daya aparatur bertujuan untuk memperbaiki efektifitas dan produktifitas kerja dalam melaksanakan dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Poin pentingnya adalah bagaimana integrasi ini harus terus di rawat oleh semua Aparatur, sehingga secara esensial perubahan reformasi birokrasi, Kabupaten Lamongan zona integritas dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan mewujudkan harapan masyarakat, tentunya dengan keberhasilan program-program dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

Pengelolaan SDM atau ASN dilakukan untuk memotivasi dan juga meningkatkan produktivitas pegawai dalam melaksanakan tugasnya sehingga mampu berkontribusi pada pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Untuk mendapatkan profil pegawai yang produktif, efektif dan efisien pada Pemerintah Kabupaten Lamongan, Bupati Lamongan menerbitkan Peraturan Bupati sebagai respon setuju merit system yang harus dijalankan pada Pemerintahan Kabupaten Lamongan.

Dalam mewujudkan kejayaan Lamongan yang berkelanjutan, menjadi perhatian penting bagi Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam memperhatikan sumber daya manusia dan aparatur sipil Negara dalam membangun Kabupaten Lamongan. Peraturan Bupati (Perbup) Lamongan Nomor 18 Tahun 2021 tentang pemberian penghargaan ASN menjadi bentuk nyata kepedulian Pemerintah melalui BKPSDM Kabupaten Lamongan.

Dalam rangka memberikan apresiasi pemerintah kabupaten Lamongan atas prestasi atau keteladanan yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) karena telah menyumbangkan pikiran, karya, karsa, atau cipta dan dharma bakti yang bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Lamongan. ASN yang berprestasi adalah ASN yang secara nyata telah menunjukkan inovasi yang bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat baik tingkat daerah, nasional ataupun internasional. Adapun maksud dan tujuan terbitnya perbup terkait pemberian penghargaan adalah untuk meningkatkan semangat pengabdian sebagai ASN, meningkatkan motivasi dan semangat kerja dalam melaksanakan tugas pokok,

meningkatkan kinerja produktivitas ASN, meningkatkan kualitas integritas dalam bekerja serta mendorong nilai-nilai keteladanan dalam bekerja.

Dynamic Governance sebagai Bentuk Strategi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lamongan. Dalam rangka mengantisipasi perubahan global yang cepat, pemerintah juga harus membangun tata kelola pemerintahan yang lebih dinamis (*dynamic governance*). Sejalan dengan hal tersebut juga, pemerintah Kabupaten Lamongan perlu memperbaiki tata kelola pemerintahan yang ada dengan memberi perhatian kepada pembangunan SDM aparatur, khususnya untuk dapat melahirkan para pemimpin birokrasi yang mampu berpikir kedepan (*thinking ahead*), mengkaji ulang (*thinking again*) dan belajar dari Negara atau organisasi lain (*thinking across*).

Dynamic governance di Negara maju dan demokratis sudah merupakan bagian yang integral dari sistem pemerintahan Negara yang bersangkutan. Sedangkan, di Negara yang berkembang *dynamic governance* tidak muncul secara spontan, tetapi merupakan hasil dari upaya kepemimpinan yang memiliki kapabilitas untuk membangun suatu bangsa yang maju agar mampu bertahan hidup dan lingkungan yang berubah dengan cepat. Kapabilitas adalah pola pikiran dan cara kerja yang terbentuk dalam waktu yang lama melalui proses pembelajaran. Selanjutnya, Neo dan Chen (2007: 29-46) mengatakan bahwa : *capabilities* terdiri dari tiga unsur yaitu:

1. Thinking Ahead (Berfikir Kedepan)

Merupakan kemampuan mengidentifikasi faktor lingkungan berpengaruh pada pelaksanaan pembangunan masa mendatang, memahami dampaknya terhadap sosial-ekonomi masyarakat, mengidentifikasi pilihan-pilihan investasi yang memungkinkan masyarakat memanfaatkan kesempatan baru dan menghindari potensi ancaman yang dapat menghambat kemajuan masyarakat. Berfikir kedepan ini akan mendorong institusi pemerintah menilai dan meninjau kembali kebijakan dan strategi sedang berjalan, memperbaharui target dan tujuan, dan menyusun konsep baru kebijakan yang dipersiapkan menyongsong masa depan.

Untuk mengubah Kabupaten Lamongan menjadi lebih baik dengan mengupayakan

kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lamongan maka perlu melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders) yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat dalam merumuskan setiap kebijakan. Berikut adalah kebijakan atau program Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam mewujudkan kejayaan yang berkeadilan.

Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang sejahtera, religius berbudaya, aktif dalam pembangunan, serta lingkungan yang aman dan tentram. Serta, menghadirkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas sebagai upaya optimalisasi reformasi birokrasi. Misi dan visi tersebut kemudian tertuang dalam 11 (sebelas) program prioritas yang menjadi acuan dalam memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat, program tersebut yakni program pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, infrastruktur, pertanian dan perikanan, umkm, pemuda dan olahraga, pariwisata, pelayanan publik, sosial kesejahteraan dan pembangunan desa.

2. Thinking Again (Meninjau Kembali)

Thinking Again merupakan kemampuan meninjau kembali berbagai kebijakan, strategi, dan program sedang berjalan. Apakah hasil yang dicapai oleh kebijakan, strategi, dan program telah memenuhi harapan banyak pihak atau perlu didesain ulang untuk mendapatkan kualitas hasil yang lebih baik. Kerangka waktu melakukan kaji ulang mulai dari kondisi yang sekarang dihadapi sampai masa waktu berlakunya kebijakan, strategi, dan program, dengan membandingkan apa yang dicapai dengan apa yang diinginkan. Kaji ulang dilakukan terhadap hal-hal yang sudah terjadi mencakup pemanfaatan data, informasi-informasi baru, ukuran atau standar yg telah ditentukan, warisan masalah dari suatu kebijakan atau program, dan umpan balik yang diterima. Visi misi mewujudkan Lamongan menuju kejayaan dan berkelanjutan serta ingin menjadi Dynamic Governance, Pemerintah Kabupaten Lamongan melaksanakan beberapa program dan kebijakan prioritas dalam rentan waktu 2025-2026 dalam mewujudkan Dynamic Governance Kabupaten Lamongan. Program dan kebijakan tersebut merupakan prioritas di Kabupaten Lamongan sesuai dengan kebutuhan

serta urgensi di lapangan. Program Prioritas Pemerintah Kabupaten Lamongan yang terdapat dalam dokumen RPJMD 2025-2029, sebagai pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) terdapat dalam Peraturan Bupati (Perbup) Lamongan Nomor 31 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan 2026.

Berikut adalah bentuk Dynamic Governance terkait langkah pemerintah Kabupaten Lamongan dalam mewujudkan kejayaan berkelanjutan;

a. Program Perintis

Dynamic Governance dalam bidang pendidikan. Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan menjadi pelaksana program perintis Pemerintah Kabupaten Lamongan. Program Perintis Adalah suatu Program Pemerintah Daerah untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan menjamin pemerataan, kesempatan dan peningkatan mutu pendidikan bagi masyarakat melalui pemberian beasiswa pendidikan kepada siswa SD,SMP,SMA sederajat dan Mahasiswa D3,D-4/S1,S2 yang kurang sejahtera dan atau berprestasi. Beasiswa pendidikan gratis dengan total alokasi 7.230, untuk jenjang SD, SMP, SMA, dan S1 serta S2 khusus hafidz sudah bisa diakses oleh seluruh masyarakat di Lamongan. beasiswa ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menjamin pemerataan kesempatan, dan peningkatan mutu pendidikan bagi masyarakat di Kabupaten Lamongan. Program perintis tentu menjadi salah satu program unggulan Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.

b. Megpreneur (Megilan Entrepreneur)

Pemerintah Kabupaten Lamongan menyiapkan jagoan bisnis di masa depan. Mengingat perkembangan zaman yang semakin signifikan, percepatan tidak hanya tumbuh dalam kelajuan cahaya, percepatan terjadi dan menyertai semua sektor. Dengan kemajuan digitalisasi teknologi yang semakin menggeliat, ambisi besar digaungkan pada Megilan Entrepreneur (Megpreneur) yangmana sebagai program prioritas bisnis berbasis teknologi informasi yang memiliki potensi besar untuk memajukan sektor perekonomian daerah serta menyiapkan masa depan generasi, Dengan adanya inkubasi bisnis pada megpreneur diharapkan bisa

menjadi jagoan bisnis dimasa depan. Setelah Program Megpreneur, Pemerintah Kabupaten Lamongan juga akan membuat inovasi lanjutan dalam bidang ekonomi, yaitu membangun Co Working Space sebagai media pelaku pebisnis dan pemuda di Kabupaten Lamongan. Dalam program ini, Dinas Koperasi dan UMKM menjadi pelaksana Program Megpreneur Kabupaten Lamongan. Pemerintah sediakan Co Working Space untuk menghubungkan ekosistem bisnis yang ada di Lamongan, dengan keterhubungan bisnis akan menjadikan bisnis di Lamongan semakin kuat, terutama bagi para pebisnis Muda.

c. Program Jamula (Jalan Mantap Alus Lamongan)

Bupati Lamongan Yuhronur Efendi benar-benar komitmen dan memberikan perhatian dalam mewujudkan dan merealisasikan program unggulan prioritas Kabupaten Lamongan, yakni Jamula (Jalan Mantap Alus Lamongan). Jamula merupakan salah satu program prioritas dan inovasi dari Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Dinas PU Binamarga dan kolaborasi dengan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan. Sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam membangun Dynamic Governance Program Jamula diharapkan ingin mewujudkan infrastruktur handal dan berkelanjutan Lamongan. Serta difokuskan pada peningkatan kepuasan layanan infrastruktur yang merata dan berkualitas. Program jamula diharapkan juga mampu memperlancar segala bentuk mobilitas serta perekonomian masyarakat Lamongan.

d. Program Yakin Semua Sejahtera (YSS)

Berbagai program pembangunan terus diciptakan, salah satunya dengan Program Kartu Yakin Semua Sejahtera (YSS) yang merupakan kerjasama antara Pemkab Lamongan dengan Bank Jatim. Kartu YSS diharapkan mampu meningkatkan pemberdayaan dan produktivitas masyarakat. Adapaun beberapa program dari kartu YSS, beberapa diantaranya yakni program peningkatan pendapatan keluarga penerima manfaat dan diprioritaskan bagi kepala rumah tangga perempuan produktif, serta program

bantuan bagi takmir masjid atau pemuka agama di kabupaten Lamongan. kartu YSS diharapkan mampu memberikan percepatan dalam mendukung program pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga membawa Lamongan menuju kabupaten yang semakin sejahtera. Kolaborasi OPD di Kabupaten Lamongan dalam implementatif penguatan program prioritas YSS sangatlah berdampak pada masyarakat Kabupaten Lamongan, beberapa bentuk wujud Program YSS adalah adanya keterlibatan Pemerintah dan Masyarakat bersinergi, terlihat adanya rantang kasih, pemberdayaan KRTP dan BPNT.

3. Thinking Across

Thinking Across merupakan kemampuan untuk mengadopsi pikiran, pendapat, ide-ide lain di luar kerangka berpikir (mindset) yang secara tradisional telah melekat dan menjadi dasar melakukan sesuatu. Dengan belajar dari pengalaman dan pemikiran orang lain dalam mengelola sebuah negara atau pemerintahan maupun organisasi akan didapat ide-ide dan pemikiran dalam melakukan inovasi bagi perbaikan kebijakan, strategi, dan program untuk bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berbagai program dan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan merupakan salah satu bentuk reformasi birokrasi yang ada di Pemerintah Kabupaten Lamongan. Inovasi, program dan kebijakan yang berlangsung merupakan langkah kongkrit Pemerintah Kabupaten Lamongan menjadi Dynamic Governance. Proses thinking across dapat dilakukan melalui: (1) Mencari dan menemukan praktek-praktek implementasi suatu kegiatan atau program yang kurang lebih sama atau memiliki kemiripan dengan program atau kebijakan yang cocok untuk Kabupaten Lamongan; (2) Pemerintah Kabupaten Lamongan perlu merefleksikan atau menggambarkan evaluasi dan membuat program kedepan tentunya yang sesuai dengan kebutuhan serta kepentingan masyarakat; (3) Evaluasi apa yang dapat diterapkan pada kontek lokal dan pertimbangkan hal-hal yang mungkin dapat diterima masyarakat lokal; dan (4) Sesuaikan kebijakan dan program dengan kebutuhan local Kabupaten Lamongan.

Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang sejahtera, serta memberikan pelayanan publik yang

berkualitas sebagai upaya optimalisasi reformasi birokrasi. Inovasi, kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Lamongan Wujud kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Lamongan merupakan bukti sinergitas OPD dan semua lini yang ada di Kabupaten Lamongan sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Dynamic Governance pada Pemerintahan Kabupaten Lamongan.

KESIMPULAN

Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkelanjutan merupakan visi Kabupaten Lamongan periode 2025-2029. Dalam mewujudkan visi tersebut, salah satu prioritasnya adalah pembangunan birokrasi yang juga menjadi misi dari kepala daerah yaitu menghadirkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas sebagai upaya optimalisasi reformasi birokrasi. Berjalannya birokrasi di sebuah pemerintahan tidak luput dari peran aparatur negara didalamnya. Sebagai salah satu unsur penggerak birokrasi, elemen sumber daya manusia (SDM) aparatur menjadi hal yang penting untuk terus dikembangkan, hal ini dikarenakan performa dan kualitas layanan instansi pemerintah sangat dipengaruhi oleh kapasitas aparaturnya.

Dalam rangka mengantisipasi perubahan global yang cepat, strategi pemerintah membangun tata kelola pemerintahan yang lebih dinamis (dynamic governance). Sejalan dengan hal tersebut juga, pemerintah Kabupaten Lamongan perlu memperbaiki tata kelola pemerintahan yang ada dengan memberi perhatian kepada pembangunan SDM aparatur, khususnya untuk dapat melahirkan para pemimpin birokrasi yang mampu berpikir kedepan (thinking ahead), mengkaji ulang (thinking again) dan belajar dari Negara atau organisasi lain (thinking across).

Visi misi mewujudkan Lamongan menuju kejayaan dan berkelanjutan serta ingin menjadi Dynamic Governance, Pemerintah Kabupaten Lamongan melaksanakan beberapa program dan kebijakan prioritas dalam mewujudkan Dynamic Governance Kabupaten Lamongan. Program dan kebijakan tersebut merupakan

prioritas di Kabupaten Lamongan sesuai dengan kebutuhan serta urgensi di lapangan. Berikut adalah bentuk Dynamic Governance terkait langkah pemerintah Kabupaten Lamongan dalam mewujudkan kejayaan berkelanjutan; Program pendidikan, Program pembangunan infrastruktur, Program ekonomi kepemudaan dan kerakyatan, Program pembangunan SDM dan Program Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lamongan.

REKOMENDASI

1. Pemerintah Kabupaten Lamongan perlu memperbaiki tata kelola pemerintahan yang ada dengan memberi perhatian kepada pembangunan SDM aparatur, khususnya untuk dapat melahirkan para pemimpin birokrasi yang mampu berpikir kedepan (thinking ahead), mengkaji ulang (thinking again) dan belajar dari Negara atau organisasi lain (*thinking across*).
2. Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk Mewujudkan Program prioritas yang berkeadilan harus bekerjasama dengan berbagai actor atau stakeholder

DAFTAR PUSTAKA

- Asropi. 2008. *Budaya Inovasi dan Reformasi*. Jurnal Ilmu Administrasi, volume V Nomor 3.
- Cresswell, J.W. 2017. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed*. (Edisi Keempat). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamzah, A. 2019. *Metode Penelitian Kepustakaan: Kajian Filosofis, Teoritis, Dan Aplikatif*. Malang: L iterasi Nusantara Abadi.
- Jeffrey Pfeffer dkk. 2005, *Paradigma Baru Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta. Amara Books.
- Lijan Poltak Sinambela, 2006. *Reformasi Pelayanan Publik*. Bumi Aksara: Jakarta.
- M. Mas'ud Said. 2007. *Birokrasi Di Negara Birokratis*. UMM Press: Malang.
- Neo, B. S., & Chen, G. 2007. *Dynamic governance: embedding culture, capabilities and change in Singapore*. New Jersey: World Scientific.
- Samin Rumzi. 2011. *Reformasi Birokrasi*. Jurnal Fisip Umrah Volume 2 Nomor 2
- Satori, D., & Komariah, A. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfa Beta
- Thoha Miftah. 2007. *Dimensi Prima Administrasi Negara*. Pustaka Jaya: Jakarta.
- Thoha Miftah. 2000. *Reformasi Birokrasi Publik Pasca Orde Baru*. Perubahan Tanpa Grand Design. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 5 Nomor 3.
- Wahyudi Kumorotomo, 2008. *Akuntabilitas Birokrasi Publik, Sketsa Pada Masa Transisi*, Magister Administrasi Publik (MAP) dan Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Vince Tebay . 2020. *Implementasi Program Prioritas Dalam Pengelolaan Administrasi Kampung Di Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya*. Jurnal Kebijakan Publik. Volume 3, Nomor 2
- Weber, M., 1957. *The Theory of Social and Economic Organization*. The Free Press: New York.
- Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Aparatur Sipil Negara. Nomor 18 Tahun 2021.*
- Peraturan Bupati (Perbup) Lamongan Nomor 31 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan 2026.*